

Peran International Organization for Mitigation (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia

Nisrina Salsabila¹, Wachid Ridwan²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Email: nisrinasalbil8@gmail.com

ABSTRAK

Kemajemukan etnis dalam suatu wilayah seringkali menimbulkan perselisihan dari kurangnya rasa intoleransi antarsesama. Perbedaan etnis merupakan bentuk identitas yang melekat pada suatu individu yang menjadi ciri khas dan keunikannya. Kelompok mayoritas yang mendominasi dan intoleransi pada kelompok minoritas terkadang harus mengeliminasi kelompok tersebut dari wilayahnya hingga kelompok minoritas mencari tempat pengungsian di negara lain. Etnis Rohingya menjadi salah satu contoh diskriminasi etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Dalam mendapatkan hak kehidupan yang sama, International Organization for Migration (IOM) membantu masyarakat etnis rohingya dalam mendapatkan perlindungan dan kebutuhan khusus mengenai masalah pengungsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peran International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan konsep Organisasi Internasional, Human Security, dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, etnis Rohingya bisa mendapatkan perlindungan dan hak kehidupan yang lebih baik.

Kata Kunci : *Pengungsi, Etnis Rohingya, IOM.*

ABSTRACT

Ethnic pluralism in a region often leads to disputes from a lack of intolerance among each other. Ethnic difference is a form of identity attached to an individual that is characteristic and unique. Majority groups who dominate and intolerance to minority groups sometimes have to eliminate these groups from their territory until minority groups seek refuge in other countries. The Rohingya ethnic is one example of ethnic discrimination carried out by the Myanmar government. In obtaining the same right to life, the International Organization for Migration (IOM) assists the Rohingya ethnic community in obtaining protection and special needs regarding the issue of refugees. The purpose of this study is to examine the role of the International Organization for Migration (IOM) in providing humanitarian assistance to the Rohingya. This study uses a qualitative method with an empirical approach. Data collection is done through literature study and document study. This study uses the concepts of International Organizations, Human Security, and Human Rights. Thus, the Rohingya ethnic can get protection and the right to a better life.

Keywords : *Refugees, Ethnic Rohingya, IOM.*

1. PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara memiliki banyak keanekaragaman budaya maupun etnis dalam bermasyarakat. Kemajemukan yang ada di Asia Tenggara tercermin dengan ragam etnis dan agama yang dimiliki masyarakatnya. Kemajemukan ini menjadikan suatu wilayah bernegara membagi menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas dari etnis yang ada di wilayahnya (Kyonto, 2019). Banyak keanekaragaman yang ada di Asia Tenggara terkadang dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Perselisihan dan pertentangan antar etnis timbul dari rasa intoleransi masyarakat dan perbedaan latar belakang sejarah kelompok etnis tersebut. Kelompok mayoritas yang mendominasi dan intoleransi pada kelompok minoritas terkadang harus mengeliminasi kelompok tersebut dari wilayahnya hingga kelompok minoritas mencari tempat pengungsian di negara lain.

Isu kontemporer dalam hubungan internasional yang hangat diperbincangkan berkaitan dengan kemanusiaan, terutama dalam kedatangan pengungsi dari negara-negara yang memiliki konflik internal pada kelompok minoritas menjadi suatu masalah bagi banyak negara karena saat ini jumlah dan penyebaran kelompok tersebut begitu banyak hingga ke berbagai negara di dunia (Rizka, 2016). Menurut data UNCHR yang tercatat sejak November 2021, pengungsi yang banyak datang ke Indonesia berasal dari tiga negara yaitu Afganistan, Somalia, dan Myanmar. Kedatangan para pengungsi berasal dari kekacauan yang terjadi di negara yang berasal dari peperangan, konflik internal, bahkan genosida yang menyebabkan terjadinya perpindahan populasi yang cukup besar ke beberapa negara.

Dalam pengertian UNCHR pengungsi merupakan seorang atau kelompok yang menjadi korban dari suatu masalah seperti ras, agama, kewarganegaraan, ataupun masalah politik negara yang kemungkinan seorang atau kelompok tersebut tidak akan kembali ke negara asalnya karena timbul rasa takut dan trauma dengan situasi yang mengancam keselamatan hidupnya. Permasalahan pengungsi sudah menjadi isu kontemporer yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian dunia internasional seperti yang terjadi pada etnis Rohingya yang datang ke

beberapa negara dengan jumlah yang selalu meningkat sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam menanganinya.

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas yang beragama Islam menempati wilayah Arakan, yang terletak di bagian barat negara Myanmar. Masyarakat etnis Rohingya diperkirakan berjumlah 800.000 yang menempati wilayah Arakan dengan 25% dari populasi penduduk negara Myanmar. dasar masalah yang terjadi pada etnis Rohingya dikarenakan ada faktor perbedaan etnis antara Rohingya dan Rakhine. Etnis Rohingya dianggap bukan bagian dari suku asli dari Burma melainkan etnis Rohingya dekat dengan Bangladesh. Hal ini mengakibatkan etnis Rohingya mendapatkan banyak diskriminasi dengan tidak diberikan pengakuan kewarganegaraan, pembatasan dalam mencari pekerjaan, kerja paksa, pembunuhan, pemerkosaan, serta banyaknya pembakaran rumah dan tempat tinggal (Kyonto, 2019).

Awal mula masalah etnis Rohingya menjadi perhatian internasional dimulai pada tahun 2012 ketika terjadi persengketaan wilayah dengan etnis Rakhine. Permasalahan ini dipicu dengan isu pemerkosaan seorang wanita Rakhine (Buddha) oleh beberapa muslim Rohingya. Akibat dari masalah ini antar etnis Rohingya dan

Budha Rakhine menimbulkan aksi balas-membalas hingga menyebabkan negara Myanmar tenggelam dalam krisis kemanusiaan. Myanmar melakukan sebuah kampanye untuk mengisolasi etnis Rohingya atau disebut kebijakan rasis apartheid. Kerusuhan sektarian sejak 2012 telah menewaskan ratusan etnis minoritas dan 140.000 orang pengungsi. Aktivis dan politisi dari etnis dan agama mayoritas Rakhine telah mendesak pemerintah Myanmar untuk membatasi akses bantuan kesehatan dan kemanusiaan bagi jutaan etnis Rohingya di Myanmar (Rosyid, 2018).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dan menjadi salah satu negara islam terbesar di dunia membuat negara Indonesia segera mengambil langkah untuk menangani konflik etnis Rohingya di Myanmar. Hal tersebut juga mendapat dorongan dari masyarakat Indonesia untuk menggerakkan pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan pada etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia atas dasar

kemanusiaan, menampung dan memberikan tempat tinggal sementara bagi etnis Rohingya.

Tindakan pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada etnis Rohingya merupakan tindakan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' yang menjadi dasar negara Indonesia untuk turut membantu antarsesama terutama dalam penanganan pengungsi lintas batas-negara. Pada aturan tersebut Indonesia wajib membantu dalam masalah pengungsi dengan dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap peraturan internasional.

Jumlah pengungsi di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah pengungsi yang terdaftar sebagai pencari suaka oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia akan mencapai 13.416 jiwa. Banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Pengungsi juga dapat meningkatkan pengangguran dan kriminalitas jika tidak dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Dengan ini, Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan aktor non-negara yang terlibat dalam bidang kemanusiaan, seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).

2. TINJAUAN LITERATUR Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini, menggunakan konsep organisasi internasional. Dalam perkembangan studi Hubungan Internasional, aktor-aktor internasional tidak hanya melibatkan negara tetapi juga melibatkan pada aktor non- Negara. Institusi hadir dalam studi Hubungan Internasional karena meningkat kebutuhan yang dijadikan sebagai wadah aspirasi negara dalam membantu mengatasi suatu masalah.

Dalam pengertian Ruddy T. May organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang berdasarkan pada sistem kerjasama yang memiliki aturan dan fungsi yang jelas guna mencapai tujuan yang perlu dilakukan dan disepakati bersama. Organisasi Internasional juga dalam program pencapaiannya diharapkan secara jangka panjang maupun sementara, tentu hal tersebut

atas kesepakatan bersama antar pemerintah negara maupun aktor non-pemerintah berbeda negara.

Berbagai kebebasan yang diberikan kepada suatu organisasi internasional dalam menjalankan aktivitasnya membuat organisasi internasional semakin kuat dan berkembang di dunia. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota serta publik internasional (Bowet, 1970).

Human Security

Konsep keamanan manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam Laporan Human Development tahun 1994. Dalam laporannya mencakup dua aspek di antaranya adalah pertama terkait dengan ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, represi. Kedua tentang perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan pola kehidupan sehari-hari saat berada di rumah, pekerjaan, ataupun masyarakat serta ancaman tersebut juga dapat mengancam pada semua tingkat pembangunan dan pendapatan nasional.

Dalam ancaman keamanan yang timbul akan sesuai dengan konsep keamanan suatu objek. Berkenaan dengan konsep keamanan manusia, ancaman dapat muncul mengenai kesejahteraan dan hak individu. Ancaman yang dapat menjadi pusat keamanan manusia melibatkan ancaman fisik (berwujud) dan tidak material (tidak terlihat) seperti kurangnya pendapatan, pengangguran, kesulitan dalam mengakses fasilitas-fasilitas dan layanan kesehatan, serta akses pendidikan yang buruk bagi mereka yang terlibat dalam ancaman subjektif seperti penghinaan, ketakutan akan kejahatan dan kekerasan (Sawal, 2017).

Hak Asasi Kemanusiaan (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir pada setiap manusia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak untuk hidup, hak beragama, hak atas pendidikan dan hak-hak dasar lainnya.

Mariam Budiardjo (2008) menjelaskan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang, diperoleh sejak lahir dan kehadirannya dalam kehidupan manusia. Hak

ini ada di antara orang-orang tanpa membedakan kebangsaan, etnis, agama, kelas atau jenis kelamin, karena bersifat fundamental dan universal. Landasan dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Di Indonesia, gagasan mengenai penegakan hak asasi manusia sangat berkembang. Ketanggapan pemerintah pada HAM sejak tahun 1997 dengan berdirinya Komisi Nasional HAM. Sejak saat itu, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menjadi perbincangan serius dan berkelanjutan. Kesenambungan ini tercermin dalam upaya membawa isu HAM dalam kerangka budaya dan sistem politik nasional ke tingkat implementasi dalam rangka membentuk jaringan kerjasama untuk menjaga dan melindungi HAM tersebut di Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didefinisikan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang menjadi ancaman manusia yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lain. Pelanggaran HAM dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik tergantung pada konteks HAM yang dilanggar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disebutkan Sukidin (2002) bahwa metode kualitatif merupakan usaha dalam mendeteksi berbagai keunikan yang ada pada individu, kelompok, masyarakat ataupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara umum, rinci, mendalam, dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang menjadi sumber utama. Data sekunder digunakan pada teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data literatur bersumber dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, website, dan berbagai data lain yang berkaitan dengan

masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Etnis Rohingya

Tahun 2012 merupakan titik permulaan terjadinya masalah pada etnis Rohingya. Dasar masalah tersebut dimulai saat persengketaan wilayah dengan etnis Rakhine. Pemerintah Myanmar menilai etnis Rohingya bukan bagian dari etnis di Myanmar melainkan etnis Rohingya bagian dari etnis Bengali, Bangladesh (Rosyid, 2018). Tidak ada pengakuan dari Myanmar membuat etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan pemerintah Myanmar mengusir etnis Rohingya dari wilayahnya dengan melakukan genosida etnis.

Pencabutan kewarganegaraan etnis Rohingya meninggalkan konsekuensi yang tidak terhitung. Sebagai kelompok minoritas, Rohingya telah menjadi sasaran sejumlah tindakan kekerasan dari berbagai latar belakang, mulai dari militer Myanmar, pegawai pemerintah hingga tokoh masyarakat. Kekerasan ini mengarah ke kekerasan seksual terhadap perempuan dan kekerasan fisik terhadap anak (Kyonto, 2019).

Gambaran Umum IOM

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi internasional yang bekerja di bidang migrasi. IOM berdiri pada tahun 1973 pasca perang dunia kedua dengan awal tujuan untuk membantu penempatan pengungsi korban perang dunia. Pada saat ini, IOM sudah berada di 173 negara anggota dan 8 negara sebagai negara pengamat. IOM memiliki kantor perwakilan di berbagai negara, namun kantor pusat IOM berada di Jenewa, Swiss.

IOM bekerja untuk membantu pengaturan yang tertib dan berkemanusiaan serta hak asasi manusia untuk migrasi, untuk mempromosikan kerjasama internasional dan masalah migrasi, untuk membantu negara-negara menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi masalah migrasi umum dan memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan imigran dan pengungsi, serta orang-orang terlantar.

Dalam bekerja, IOM memiliki visi utama organisasi yaitu memproteksi, memfasilitasi, mengurangi masalah, dan menangani pergerakan korban permasalahan migran. Visi tersebut merupakan suatu cerminan dari tujuan IOM dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat delapan tugas manajemen migrasi yang dilakukan oleh IOM antara lain :

1. Migration Health

IOM membantu para migran terkait kesehatan mereka melalui Migration Health Division untuk memberikan penanganan kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Upaya ini bertujuan untuk membantu migran agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, IOM juga membantu dan memfasilitasi para migran terhindar dari penyakit menular maupun mematikan.

2. Immigration and Border Management

Pada bagian ini, IOM membantu pemerintah suatu negara dalam meningkatkan kebijakan, undang-undang, sistem operasional, sumber daya manusia dan struktur administrasi maupun teknis yang diperlukan untuk merespons secara lebih efektif terhadap beragam tantangan migrasi dan pengelolaan perbatasan.

3. Migrant Protection and Assistance

IOM dalam perlindungan dan bantuan migran bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka serta mempromosikan dan menegakkan hak para migran. IOM juga memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak migran, sehingga berkontribusi untuk mengelola sesuai dengan standar dan praktik internasional.

4. Labour Migration

IOM mendukung pekerja migran di host country dengan menjadi fasilitator antara migran dan pemerintah host country. IOM juga membantu mempersiapkan kebutuhan dan fasilitas para migran agar berguna di negara sebagai host country maupun saat nanti mereka kembali ke negara asal.

5. Migration, Environment, and Climate Change

Selain menangani migran, IOM juga bekerja pada kepedulian lingkungan yang bekerja sama dengan negara anggota dan

organisasi internasional lainnya. Visi IOM dalam migrasi, lingkungan dan perubahan iklim adalah tata kelola, kebijakan, dan praktik migrasi kontemporer harus mencerminkan pentingnya faktor lingkungan, bencana, dan perubahan iklim terhadap mobilitas manusia. Faktor lingkungan harus diintegrasikan di semua bidang manajemen migrasi, seperti: pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pengungsian, manajemen perbatasan, migrasi dan integrasi tenaga kerja, serta pemulangan dan reintegrasi.

6. Migrant Integration and Training

Pada bagian ini, IOM bekerja pada pendekatan yang komprehensif dan seluruh masyarakat untuk integrasi migran agar dapat memastikan para migran dipersiapkan sebelum keberangkatan mereka maupun pada saat kedatangan mereka untuk mengetahui keadaan mereka saat berintegrasi dalam masyarakat di negara yang mereka datang.

7. IOM Development Fund

IOM bekerja dalam mendukung pendanaan terkait migrasi di negara anggota yang bekerjasama dengan IOM. Pendanaan IOM berfokus pada pengelolaan migran, serta meningkatkan kesadaran akan hak asasi migran (kegiatan sosial).

8. Migration, Sustainable Development and The 2030

Agenda Pada bagian ini, IOM bekerja untuk perencanaan di tahun 2030 yang sebagaimana IOM mendukung dalam pembangunan berkelanjutan bagi para migran dan komunitas mereka. IOM melihat agenda ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam bentuk keterampilan, penguatan angkatan kerja, investasi dan keragaman budaya, serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di negara asal mereka melalui transfer keterampilan dan sumber daya keuangan.

Peran IOM Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia IOM pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1979 dan IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani migrasi. IOM memberikan pengamanan hak asasi manusia, terutama hak bermigrasi bagi para pengungsi. Pada tahun 2000, IOM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama melawan perdagangan manusia di Indonesia (Domloboy, 2017). IOM ditugaskan untuk mempromosikan migrasi yang bersifat

manusiawi dan tertib untuk kepentingan semua. IOM memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 1979 dengan menangani imigran Vietnam di Tanjung Pinang Riau (Asih, 2015).

Peran yang dilakukan oleh IOM untuk pengungsi etnis Rohingya adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan dan memastikan pengungsi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. IOM membantu dalam meningkatkan kualitas perawatan bagi migran ilegal yang dicegah dan melaporkan diri atas pengetahuan pemerintah Indonesia ke IOM yang sesuai dengan standar kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berlaku. IOM memberikan fasilitas konseling, perawatan kesehatan, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan dukungan karir kepada para migran yang tinggal di dalam dan di luar Rumah Detensi Imigrasi (Asih, 2015).

Kedatangan etnis Rohingya saat memasuki wilayah Indonesia, UNHCR dan IOM bekerja sama untuk menangani masalah ini. Kedua organisasi internasional tersebut bekerja sama berdasarkan MoU sejak tahun 1997. Berdasarkan MoU tersebut, UNHCR dan IOM bekerja sama dalam upaya yang berbeda namun berjalan bersamaan. Berdasarkan MoU tersebut, peran dan tanggung jawab kedua organisasi internasional tersebut meliputi pengungsi, migran, pencari suaka, pencari suaka yang ditolak statusnya, pihak yang kembali ke negara asal, pengungsi internal, dan penduduk lokal yang berada dalam negara yang sedang berkonflik (Tambunan, 2019).

Selain dengan UNHCR, IOM juga melakukan penandatanganan MoU dengan instansi pemerintah lokal dan nasional. Pada permasalahan yang terjadi dengan etnis Rohingya, IOM juga telah bermitra dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan eksekusi, pengumpulan data dan wawancara pada etnis Rohingya (Domloboy, 2017).

Sebagai organisasi internasional, IOM dalam hal ini secara aktif terlibat dalam proses migrasi yang tertib, termasuk proses pengalihan pengungsi yang diselenggarakan sesuai dengan misi yang diterima dari IOM berdasarkan MoU UNHCR (Tambunan, 2019). Menurut laporan data UNHCR sampai Desember 2021, Indonesia menerima etnis Rohingya dari tahun 2020 dengan total 581 orang pengungsi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, maupun anak-anak.

Pemerintah Indonesia menanggapi pengungsi dengan dukungan IOM dengan cara yaitu; pertama, IOM menemukan pengungsi dengan menjelaskan situasi mereka dan membantu pengambilan keputusan, termasuk adanya permohonan menjadikan mereka pengungsi di Indonesia dengan bantuan UNHCR. Namun, jika salah satu pengungsi ingin dipulangkan ke negara asalnya, IOM akan mengurus semuanya, termasuk tiket dan semua dokumen yang diperlukan. Kedua, pengungsi yang ditemukan oleh pihak berwenang dilaporkan ke IOM, kemudian mereka akan diperiksa kesehatannya oleh tim, serta diberi bantuan kemanusiaan berupa tempat tinggal, makanan, maupun tunjangan (Domloboy, 2017).

Pada masa gelombang pengungsi yang sangat tinggi, etnis Rohingya pertama kali tiba di ujung barat Indonesia yaitu provinsi Aceh. Tempat penampungan pertama yang dibangun IOM dengan dukungan pemerintah daerah berada di kawasan Aceh. Pengungsi Rohingya ditempatkan di banyak kamp pengungsi di wilayah Indonesia. Sebagian besar pengungsi Rohingya ditempatkan di wilayah Aceh, Makassar, Medan dan Jakarta (Tambunan, 2019).

Etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia, tidak hanya orang dewasa melainkan juga banyak anak-anak. Melihat keadaan etnis Rohingya yang tidak memungkinkan, IOM memberikan konseling untuk membantu psikologis pengungsi anak etnis Rohingya serta hak pendidikan pada pengungsi anak etnis Rohingya. Bersama dengan UNHCR, mereka bekerja sama dengan salah satu sekolah Makassar untuk mendukung pendidikan anak-anak pengungsi Makassar, termasuk anak-anak pengungsi Rohingya. Sekolah tersebut menawarkan kelas bahasa untuk anak-anak pengungsi. Dalam mendukung situasi psikososial pengungsi Rohingya, IOM juga memberikan pelatihan keterampilan pada para pengungsi seperti pelatihan menulis dan membaca bahasa Latin atau Arab, serta pelatihan perilaku dan berbicara bahasa Indonesia (Tambunan, 2019).

Dalam memenuhi kebutuhan hidup pengungsi etnis Rohingya, IOM memberikan tunjangan bulan kepada pengungsi Rohingya di Aceh untuk memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Tunjangan yang diberikan oleh IOM

termasuk ke dalam program IOM yaitu Development Fund. Pada tahap pemenuhan kebutuhan pengungsi, IOM memberikan tunjangan kepada pengungsi dewasa secara individu senilai Rp 1.250.000 perbulan dan pengungsi anak-anak secara individu senilai Rp 500.000 per bulan (Magribi, 2018). IOM dan UNHCR juga telah bekerja sama dengan operator seluler Indonesia dalam komunikasi dan akses internet untuk pengungsi Rohingya di Indonesia (Magribi, 2018). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pengungsi etnis Rohingya dapat saling bertukar informasi dan berkomunikasi dengan saudara yang terpisah jauh dari mereka.

Saat negara kedatangan pandemi COVID-19, IOM memberikan penanganan kesehatan kepada pengungsi etnis Rohingya sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia serta mematuhi aturan protokol kesehatan. Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia saat pandemi membuat IOM harus bekerjasama dengan Satuan Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri baik tingkat lokal maupun nasional. IOM mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia saat datangnya pengungsi harus dikarantina selama 10 hari dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. IOM juga bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk memastikan keadaan pengungsi etnis Rohingya serta pemeriksaan yang aman terkait kesehatan dan makanan bagi pengungsi Rohingya.

IOM dibawah kerangka kerja Rencana Kesiapsiagaan dan Respons IOM Global, IOM Indonesia mengutamakan pada respons kemanusiaan dan pembangunan untuk mengatasi populasi yang sedang berpindah dan rawan ketika menghadapi dampak pandemi COVID-19. IOM juga memenuhi permintaan bantuan dari pemerintah maupun Satuan Tugas Nasional COVID-19.

Sejak masuknya pandemi COVID-19, IOM telah bekerja dengan dinas kesehatan dan rumah sakit di seluruh negara anggota IOM untuk memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka Indonesia terlibat penuh dalam tindakan yang tanggap pada COVID-19. Tindakan tersebut berupa upaya penjangkauan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk para pengungsi,

peningkatkan pada tindakan pencegahan di tempat penampungan pengungsi, serta pengiriman masker dan perlengkapan kebersihan untuk pengungsi. Selain itu, IOM bersama pemerintah terkait kesehatan juga telah memberikan fasilitas pengujian COVID-19, pelacakan kontak, manajemen kasus, serta langkah-langkah mengenai kesiapsiagaan untuk karantina.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh pada Juli 2020, IOM bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakat setempat melakukan tindakan membantu etnis Rohingya setelah terombang-ambing lama di lautan lepas. Etnis Rohingya diamankan oleh IOM ke tempat pengungsian dan diperiksa kesehatan melalui rapid test COVID-19. Etnis Rohingya yang telah diperiksa tidak terjangkit virus dan hasil test juga menunjukkan negatif pada etnis Rohingya. IOM dalam menangani pengungsi Rohingya memberikan akses pelayanan kesehatan dan bantuan psikososial etnis Rohingya untuk memulihkan rasa trauma dan gangguan kecemasan pada pengungsi Rohingya terutama anak-anak dan perempuan etnis Rohingya. Hal tersebut dianggap penting oleh IOM karena pengungsi yang dibawah pengawasan IOM terdiri dari perempuan dan anak-anak sehingga dibutuhkan perlindungan dan pengawasan yang lebih.

Keberlangsungan pandemi COVID-19 membuat IOM harus bergerak secara kesiapsiagaan. IOM memfokuskan pada empat strategi sebagai tujuan utamanya diantara lain: Pertama, IOM harus berkoordinasi dengan pemerintah maupun mitra secara efektif terutama pada pelacakan mobilitas migran maupun pengungsi. Kedua IOM bertindak secara kesiapsiagaan dan tanggap dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas pada pengungsi maupun pencari suaka. Ketiga, IOM mengupayakan pada orang yang terkena dampak pada akses ke layanan dasar, komoditas, dan perlindungan. Keempat, IOM memberikan mitigasi pada orang yang terkena dampak sosial ekonomi COVID-19.

Kedatangan pandemi COVID-19 mengharuskan IOM dalam mengatur alokasi pendanaan dengan mengutamakan pada sesuatu yang bersifat mendesak. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian IOM diantara lain:

1. IOM memberikan pengadaan dan distribusi perlengkapan kebersihan

kepada para pengungsi maupun kelompok migran yang rentan, termasuk pada pekerja migran yang kembali maupun pengungsi internal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta mempromosikan pencegahan dan pengendalian infeksi.

2. IOM menangani risiko dari pandemi COVID-19 ditempat penampungan migran yang berukuran kecil dan padat serta memberikan fasilitas karantina sementara termasuk intervensi yang disesuaikan dengan standar melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV).
3. IOM dalam mendukung Klaster Nasional Perlindungan dan Pengungsian bertujuan untuk meningkatkan tanggapan bantuan bagi para Pengungsi Internal (IDPs) serta memastikan layanan di multi-sektoral termasuk pada intervensi dan pencegahan berbasis kamp.
4. IOM juga membantu dalam meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menangani dan menstabilisasikan kepulauan massal pekerja migran Indonesia.

IOM memberikan bantuan pendanaan senilai 15 miliar rupiah dalam bentuk peralatan medis, ventilator, perlengkapan kesehatan dan kebersihan ke rumah sakit, fasilitas kesehatan, serta dana bagi masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemi. IOM juga memberikan mesin suplai rantai dingin (cold chain supplies) untuk memastikan keamanan penyimpanan vaksin dan menjaga kualitas vaksin dari proses pembuatan hingga sampai injeksi.

Upaya IOM dalam pandemi COVID-19 memberikan peran yang penting bagi migran maupun para pengungsi untuk memiliki akses terhadap vaksin COVID-19. IOM bekerjasama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit di Indonesia untuk memperkuat penanganan pemerintah dimasa pandemi dalam menanggulangi dampak kesehatan maupun sosial saat pandemi. IOM bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung ketersediaan vaksinasi bagi para migran maupun pengungsi.

KESIMPULAN

Isu kontemporer dalam hubungan internasional semakin berkembang, terdapat

konflik dalam negara dapat menimbulkan masalah kemanusiaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan terkait kemanusiaan telah dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar yang dimana mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak dan terancam hak asasinya.

Tahun 2012 merupakan titik permulaan terjadinya masalah pada etnis Rohingya. Dasar masalah tersebut dimulai saat persengketaan wilayah dengan etnis Rakhine. Pemerintah Myanmar menilai etnis Rohingya bukan bagian dari etnis di Myanmar melainkan etnis Rohingya bagian dari etnis Bengali, Bangladesh. Melihat kejadian tersebut membuat etnis Rohingya tidak mendapatka pengakuan dari Myanmar sehingga enis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan pemerintah Myanmar mengusir etnis Rohingya dari wilayahnya dengan melakukan genosida etnis.

Permasalahan yang terjadi pada etnis Rohingya mendapatkan perhatian dari dunia sehingga aktor non-negara turut membantu untuk memberikan fasilitas dalam memenuhi hak kehidupan. International Organization for Migration (IOM) merupakan salah satu organisasi internasional yang memberikan penanganan kepada etnis Rohingya untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. IOM bekerja untuk membantu pengaturan yang tertib dan berkemanusiaan serta hak asasi manusia untuk migrasi. IOM memiliki visi utama organisasi yaitu memproteksi, memfasilitasi, mengurangi masalah, dan menangani pergerakan korban permasalahan migran. Visi tersebut merupakan suatu cerminan dari tujuan IOM dalam menjalankan tugasnya.

Peran yang dilakukan oleh IOM untuk pengungsi etnis Rohingya adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan dan memastikan pengungsi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. IOM membantu dalam meningkatkan kualitas perawatan bagi migran ilegal yang dicegat dan melaporkan diri atas pengetahuan pemerintah Indonesia ke IOM yang sesuai dengan standar kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berlaku. IOM memberikan fasilitas konseling, perawatan kesehatan, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan dukungan karir kepada para migran yang tinggal di dalam dan di luar Rumah Detensi Imigrasi.

Sejak masuknya pandemi COVID-19, IOM telah bekerja dengan dinas Kesehatan dan rumah sakit di seluruh negara anggota IOM untuk memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka Indonesia terlibat penuh dalam tindakan yang tanggap pada COVID-19. Tindakan tersebut berupa upaya penjangkauan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk para pengungsi, peningkatan pada tindakan pencegahan di tempat penampungan pengungsi, serta pengiriman masker dan perlengkapan kebersihan untuk pengungsi. Selain itu, IOM bersama pemerintah terkait kesehatan juga telah memberikan fasilitas pengujian COVID-19, pelacakan kontak, manajemen kasus, serta langkah-langkah mengenai kesiapsiagaan untuk karantina.

Upaya IOM dalam pandemi COVID-19 memberikan peran yang penting bagi migran maupun para pengungsi untuk memiliki akses terhadap vaksin COVID-19. IOM bekerjasama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit di Indonesia untuk memperkuat penanganan pemerintah dimasa pandemi dalam menanggulangi dampak kesehatan maupun sosial saat pandemi. IOM bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung ketersediaan vaksinasi bagi para migran maupun pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London : University of Aberdeen.
- Argadianti, Rizka R. (2016). *Hidup Yang Terbaikan "SUAKA" Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: LBH
- Bowet D.W, 1970. *The Law of International Institution*. 2nd ed. London: Butterworth.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Perwita, B., & Yani, M. (2005). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rudy T. May, 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Siyoto,S., & Sodik,A.M, (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: Literasi Media Publishing.

Sukidin, B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif, perspektif mikro*. Surabaya: Insane Cendikia.

Skripsi :

Kyonto Ammar M, *Peran ASEAN Intergovernmental Comission on Human Right (AICHR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Indonesia Periode 2015-2018*, Jakarta: Universitas UPN"Veteran" Jakarta. 2019.

Sawal Indah A, *Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap Negara-Negara ASEAN, Makassar, Sulawesi Selatan* : Universitas Hassanudin, 2017.

Jurnal :

Asih, H,A, *Peran International Organization For Migration Dalam Mengatasi Pengungsi Asal Myanmar Di Indonesia Tahun 2010- 2013*, *Jurnal Global and Policy*, vol.3 no.1. 2015.

Domloboy E.N., *Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya di Indonesia*, *Jurnal PIR*, vol.2 no.1. 2017. <http://e-journal.potensi->

- utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/397
- Rosyid Moh., Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar, *Jurnal Hukum & Pembangunan* No.3, Juli-September 2019.
- Tambunan Wulandari A., Kerjasama UNHCR dan IOM Dalam Menanggapi Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol.5 no.2. 2019.
- Website :
- IOM, Migration Management <https://www.iom.int/migration-management>. Diakses 14 Juli 2022.
- IOM 2021, IOM Menyediakan Makanan, Air, dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Kedatangan Terbaru Rohingyadi Indonesia <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-menyediakan-makanan-air-dan-pemeriksaan-kesehatan-untuk-kedatangan-terbaru-rohingya-di-indonesia>. Diakses pada 15 Juli 2022.
- IOM 2020, Rencana Persiapan dan Respons COVID-19 IOM Indonesia <https://indonesia.iom.int/id/news/rencana-persiapan-dan-respons-covid-19-iom-indonesia> Diakses pada 15 Juli 2022.
- IOM 2021, IOM donasi lemari pendingin vaksin untuk mendukung program vaksinasi nasional COVID-19 di Indonesia <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-donasi-lemari-pendingin-vaksin-untuk-mendukung-program-vaksinasi-nasional-covid-19-di-indonesia> Diakses pada 15 Juli 2022.
- IOM 2021, IOM puji Pemerintah Kota Bekasi yang telah membuka akses vaksinasi COVID-19 untuk pengungsi luar negeri <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-puji-pemerintah-kota-bekasi-yang-telah-membuka-akses-vaksinasi-covid-19-untuk-pengungsi-luar-negeri> Diakses pada 15 Juli 2022.
- Javier Faisal, 2021, Perjuni 2021; Pengungsi di Indonesia Mayoritas Berasal dari Afghanistan. Tersedia di: <https://data.tempo.co/data/1189/per-juni-2021-pengungsi-di-indonesia-mayoritas-berasal-dari-afghanistan>. Diakses pada 10 Juli 2022.
- Magribi, Alija 2018, Pengungsi Rohingya di Medan Mendapat Uang Bulanan dari IOM, Tersedia di <http://medan.tribunnews.com/2018/05/24/pengungsi-rohingya-di-medan-miliki-smartphone-untuk-aktivitas-sehari-hari>. Diakses pada 15 Juli 2022.